

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada permasalahan diplomatik Indonesia, serta cara bagaimana Indonesia dapat mempertahankan geopolitik regional dengan keanggotaannya di BRICS. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) yang resmi dimulai pada Januari 2025 menandai langkah strategis dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperkuat peranannya dalam tatanan global dan memperluas kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya (Manggala, 2025).

BRICS, akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, pada awalnya dicetuskan oleh Jim O'Neill dari Goldman Sachs pada tahun 2001, sebagai kumpulan negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan potensi pasar yang besar. Pada tahun 2010, Afrika Selatan secara resmi bergabung, memperluas cakupan geopolitik koalisi ini (Sachs, 2001). Dalam dua dekade terakhir, BRICS tidak hanya berkembang sebagai forum ekonomi, tetapi juga menjadi entitas geopolitik yang menantang dominasi institusi global Barat seperti G7, IMF, dan Bank Dunia.

BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) merupakan koalisi ekonomi dan politik negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam membentuk tatanan global multipolar yang dimana Rusia dan China merupakan pilar dari negara-negara yang berada di keanggotaan BRICS. Sejak pembentukannya, BRICS telah menjadi simbol resistensi terhadap dominasi negara-negara Barat dalam arsitektur global, terutama dalam aspek keuangan, politik, dan pembangunan global. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS mulai membuka diri terhadap kemungkinan ekspansi keanggotaan, termasuk negara-negara seperti Argentina, Mesir, dan Indonesia. Pada 2023, Indonesia dikabarkan sempat diundang untuk bergabung, namun memilih menunda keputusannya

dengan alasan mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas-aktif (DetikNews, 2023).

Dalam dua dekade terakhir, dinamika geopolitik global telah mengalami pergeseran signifikan dari tatanan unipolar yang didominasi oleh Amerika Serikat menuju struktur multipolar yang lebih kompleks. Kemunculan kekuatan baru dari kawasan Global South telah menentang dominasi institusi global regional seperti G7, IMF, dan Bank Dunia. Salah satu manifestasi dari tren ini adalah penguatan kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), yang secara konsisten mendorong agenda reformasi tata kelola global serta menawarkan platform alternatif bagi negara-negara berkembang untuk berkolaborasi dalam bidang ekonomi, keuangan, dan politik (South Asia Jurnal, 2025).

BRICS tidak lagi semata-mata dipandang sebagai forum ekonomi, tetapi juga sebagai entitas geopolitik yang mulai membentuk poros kekuatan tandingan terhadap dominasi Barat. Melalui inisiatif seperti dedolarisasi, pendirian New Development Bank (NDB), serta perluasan keanggotaan (BRICS+), blok ini terus memperluas pengaruhnya, khususnya di kalangan negara-negara berkembang yang mencari ruang gerak politik dan ekonomi yang lebih otonom (Geopol.uk, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap geopolitik global telah mengalami pergeseran signifikan menuju sistem multipolar, yang ditandai oleh kemunculan kekuatan-kekuatan baru yang mulai menyaingi dominasi negara-negara Barat. Salah satu manifestasi nyata dari pergeseran ini adalah penguatan kelompok BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan), yang kini memiliki pengaruh besar dalam berbagai isu internasional, termasuk reformasi lembaga keuangan global, tata kelola ekonomi dunia, serta penguatan kerja sama antar negara berkembang (*South-South Cooperation*).

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, keterlibatan ini dapat menjadi sarana diplomasi yang strategis dalam rangka memperluas cakupan kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui pendekatan multilateral, Indonesia memiliki potensi untuk

memainkan peran sebagai penyeimbang antara kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia, sekaligus memperkuat posisi tawarnya dalam berbagai forum global (The Jakarta Post,2025).

Penulis menentukan judul ini karena adanya kesempatan strategis bagi Indonesia guna memperluas pengaruh diplomatiknya serta mengukuhkan daya tawar di wilayah Indo-Pasifik lewat partisipasi dalam BRICS. Pemilihan tema ini didasari oleh kebutuhan mendesak secara strategis bagi Indonesia untuk menguatkan peran global dan posisi negosiasinya melalui keanggotaan di BRICS, yang dianggap sebagai kelompok tandingan terhadap dominasi negara-negara Barat. Dalam bingkai kebijakan luar negeri bebas-aktif, keterlibatan Indonesia di BRICS bukan hanya merupakan pengakuan atas prinsip non-blok, melainkan juga alat untuk memperteguh kepentingan nasional di tengah persaingan antar kekuatan besar dunia (Antara, 2024).

Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat dilihat sebagai bentuk *strategic hedging* dalam hubungan internasional adalah pendekatan kebijakan luar negeri dimana suatu negara tidak sepenuhnya berpihak kepada satu kekuatan besar, tetapi juga tidak bersikap netral secara pasif. Sebaliknya negara tersebut mengambil langkah proaktif dan fleksibel untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan hantama dan meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan strategis, terutama dalam menghadapi kompetisi antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Strategic hedging adalah strategi dalam politik luar negeri dan hubungan internasional yang digunakan oleh negara-negara untuk mengelola ketidakpastian dan risiko geopolitik di tengah persaingan antar kekuatan besar. Strategi ini melibatkan pendekatan yang seimbang: negara tidak sepenuhnya memihak pada satu pihak tetapi justru menjaga fleksibilitas dengan menggabungkan elemen kerjasama ekonomi, diplomatik, dan keamanan dengan berbagai aktor, sambil secara diam-diam mempersiapkan kemungkinan konflik atau perubahan kekuatan (Cheng-Chwee,2008).

Langkah ini juga dapat berisiko menimbulkan ketegangan diplomatik, namun baik di tingkat regional (dengan sesama anggota ASEAN yang memiliki orientasi politik luar negeri berbeda) maupun di tingkat global (dengan mitra strategis regional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa). Masalah utama yang

muncul adalah bagaimana Indonesia dapat menjaga keseimbangan diplomatik antara orientasi global (BRICS) dengan komitmennya terhadap stabilitas dan integrasi kawasan Asia Tenggara. Keanggotaan di BRICS berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global seperti perdagangan ekonomi, kerja sama internasional, namun juga bisa menimbulkan gesekan atau ketegangan dengan mitra regional lainnya dan memunculkan persepsi bias dalam kepemimpinannya di ASEAN (Iannone, 2025).

Kajian mengenai BRICS masih relatif terbatas dibandingkan dengan studi tentang ASEAN atau G20. Sebagian besar literatur lebih fokus pada peran Indonesia dalam kerangka kerja sama regional Asia Tenggara atau forum ekonomi global yang didominasi oleh negara-negara Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengeksplorasi alternatif poros geopolitik yang dapat dimasuki Indonesia melalui keanggotaan dalam BRICS. Analisis ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang strategi diplomasi Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana negara berkembang dapat menavigasi kompleksitas tatanan global yang semakin multipolar (Kemhan, 2025).

Sementara itu, di tingkat global, Indonesia dapat menghadapi skeptisisme dari mitra strategis tradisional seperti AS dan Uni Eropa yang melihat BRICS sebagai tandingan tatanan internasional liberal yang selama ini mereka dominasi (East Asia Forum, 2025). Seiring dengan meningkatnya pengaruh BRICS dalam tatanan global, wacana perluasan keanggotaan telah dibicarakan (Europa eu, 2024). Beberapa negara termasuk Argentina, Mesir, dan Indonesia masuk dalam radar ekspansi. BRICS sendiri bukan hanya forum ekonomi, tetapi juga memainkan peran politik dan diplomatik dalam membentuk tatanan global multipolar, sebagai tandingan dari dominasi institusi-institusi global berbasis Barat seperti G7, IMF, dan Bank Dunia (BRICS Joint Statement, 2023).

Keuntungan yang Indonesia dapatkan ketika menjadi anggota penuh dari BRICS diprediksi akan menguntungkan Indonesia dari berbagai aspek, baik di tingkat regional maupun global, penulis merumuskan hipotesis ini sebagai prediksi pribadi yang didasarkan pada tren ekspansi BRICS seperti yang dibahas dalam laporan Carnegie Endowment 2025 dan konteks Indo-Pasifik, di mana

Indonesia berperan sentral (Carnegie Endowment, 2025). Dalam konteks ASEAN, keanggotaan ini memperluas pengaruh Indonesia dengan memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dalam diplomasi ekonomi dan keamanan (Daniel, Aria, 2025). Indonesia juga memiliki peluang untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan melalui inisiatif seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan keamanan maritim. Namun demikian, potensi keterlibatan Indonesia dalam BRICS bukan tanpa tantangan diplomatik. Orientasi strategis BRICS dalam beberapa aspek bertentangan dengan kepentingan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan mitra tradisional Indonesia lainnya. Situasi ini menuntut Indonesia untuk menjalankan strategi diplomasi yang adaptif dan fleksibel, namun tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional. Selain itu, potensi keanggotaan dalam BRICS juga dapat membawa implikasi terhadap hubungan diplomatik di tingkat regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan pihak-pihak lain di kawasan Indo-Pasifik yang peka terhadap pergeseran arah geopolitik (Raden, 2025).

Indonesia memegang posisi kunci dalam sejumlah organisasi regional dan global, termasuk ASEAN, APEC, serta G20, di mana ia berperan sebagai aktor utama dalam memajukan agenda bersama (ASEAN Secretariat, 2023). Potensi keanggotaan di BRICS diharapkan dapat semakin mengukuhkan kehadirannya di panggung internasional, sekaligus membuka ruang lebih luas untuk memperbesar pengaruh politiknya secara global (The Diplomat, 2024). Melalui partisipasi ini, Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan kebijakan strategis bersama negara-negara adidaya (Council on Foreign Relations, 2023). Sebagai negara yang secara historis menerapkan prinsip diplomasi bebas dan aktif, Indonesia selalu siap membangun kemitraan dengan berbagai pihak, baik negara individu maupun kelompok ekonomi. Dengan statusnya sebagai demokrasi terbesar di Asia dan salah satu pemain dominan di wilayahnya, Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi pilar utama dalam penguatan BRICS melalui strategi yang seimbang dan terbuka (Asia Society, 2025). Keanggotaan semacam ini bisa menjadi titik balik penting bagi Indonesia dalam memperkuat eksistensinya di tengah pergeseran geopolitik dunia (Carnegie Endowment for International Peace, 2025). Dengan keterlibatan yang proaktif di BRICS, Indonesia berpotensi berfungsi sebagai penghubung antara

negara-negara berkembang dan yang maju, serta memberikan kontribusi nyata dalam menangani isu-isu krusial seperti perubahan iklim, ketegangan internasional, dan masalah keamanan global (G20 Indonesia Presidency Secretariat, 2022). Penawaran untuk bergabung dengan BRICS mewakili kesempatan emas bagi Indonesia guna menegaskan dirinya sebagai kekuatan dunia yang relevan (Asia Society, 2025). Walaupun menghadapi sejumlah hambatan, keanggotaan ini berpotensi menghasilkan manfaat substansial, seperti penguatan fondasi ekonomi domestik, perluasan akses perdagangan, dan peningkatan pengaruh diplomatik (Council on Foreign Relations, 2023). Melalui penerapan kebijakan luar negeri yang adaptif dan pendekatan ekonomi yang visioner, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini sebagai katalisator untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan, tidak hanya untuk kepentingan nasionalnya, tetapi juga untuk kemajuan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan (ASEAN Secretariat, 2023).

Dari perspektif akademik, penelitian ini penting dilakukan karena membuka jalan bagi kajian lebih lanjut mengenai perubahan struktur kekuasaan global yang ditandai oleh pergeseran dari unipolaritas menuju multipolaritas telah menimbulkan berbagai implikasi terhadap dinamika diplomasi dan geopolitik, baik pada level global maupun regional. studi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur hubungan internasional, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri negara berkembang, peran organisasi multilateral non-Barat (ASEAN), dan dinamika kekuatan menengah (*middle power*). Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS membuka ruang analisis baru mengenai bagaimana negara berkembang dapat memanfaatkan platform multilateral alternatif untuk memperkuat posisi diplomatik dan ekonomi mereka di panggung global. Hal ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang dianut Indonesia, yang menekankan pada kemandirian dalam menentukan sikap serta keterlibatan aktif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan internasional. studi ini juga berkontribusi pada diskusi akademik mengenai peran kekuatan menengah dalam sistem internasional. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk agenda global. Keanggotaan dalam BRICS dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk

memperluas pengaruh Indonesia di luar lingkup regional, serta untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional terkait isu-isu seperti reformasi tata kelola global, dedolarisasi, dan pembangunan berkelanjutan (Gusti Grehenson, 2025).

Potensi kontribusi *novelty* yang dihasilkan dari penelitian ini, akan menghasilkan strategi multitrack diplomasi yang merujuk kepada kepentingan nasional dan mengelaborasi dengan *foreign policy*. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) yang strategis dalam memperkuat posisi geopolitik dan diplomatik, baik di tingkat regional maupun global. Melalui prinsip diplomasi bebas aktif, Indonesia menghadirkan pendekatan alternatif yang menyeimbangkan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam polarisasi kekuatan global antara Barat dan Timur. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk menjalin hubungan lintas blok secara independen namun tetap berkontribusi aktif dalam isu-isu global, menjadikannya model diplomatik yang relevan di tengah ketegangan geopolitik. Selain itu, Indonesia memiliki potensi signifikan sebagai penghubung antara BRICS dan kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui perannya yang strategis di ASEAN. Hal ini membuka peluang bagi integrasi kepentingan Global South dengan dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sebagian besar studi tentang BRICS masih didominasi oleh narasi negara-negara anggota awal, terutama Tiongkok dan India. Penelitian ini menambah dimensi baru dengan mengkaji perspektif Indonesia, sebuah negara *middle power* di Asia Tenggara yang memiliki tradisi politik luar negeri non-blok dan aktif dalam ASEAN (Acharya, 2014).

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS menyimpan sejumlah potensi manfaat strategis yang mencakup aspek ekonomi, perdagangan, dan diplomasi global. Pertama, dari aspek ekonomi, BRICS merepresentasikan pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari tiga miliar jiwa. Hal ini membuka peluang luas bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk-produk unggulannya, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil. Selain itu, keberadaan *New Development Bank (NDB)* yang dibentuk oleh BRICS dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia (IMF, 2024). Tidak hanya itu, potensi kerja sama di bidang teknologi, khususnya teknologi digital dan energi terbarukan, juga berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional (ASEAN Secretariat, 2023).

Kedua, dari aspek perdagangan, BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi mitra dagang sehingga mengurangi

ketergantungan pada pasar-pasar tradisional. Misalnya, kerja sama ekonomi dengan India berpotensi memperkuat sektor tekstil dan teknologi informasi, sedangkan kemitraan dengan Rusia dapat memastikan akses terhadap teknologi pertahanan dengan biaya yang lebih efisien (O'Neill, 2001). Diversifikasi ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha nasional dalam menghadapi dinamika global.

Ketiga, dari aspek diplomasi, BRICS berfungsi sebagai forum strategis bagi negara-negara berkembang untuk mendorong reformasi tata kelola ekonomi global. Dalam konteks ini, Indonesia—sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia—memiliki posisi unik untuk menyuarakan kebutuhan akan sistem internasional yang lebih inklusif, termasuk distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia (Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, 2024). Partisipasi aktif Indonesia dalam BRICS tidak hanya akan memperkuat posisi dan daya tawarnya di tingkat global, tetapi juga meningkatkan pengaruh diplomatiknya sebagai penyeimbang dalam kebijakan ekonomi internasional.

Meskipun keanggotaan dalam BRICS menawarkan berbagai peluang strategis bagi Indonesia, terdapat pula sejumlah potensi kerugian yang perlu dikaji secara kritis. Pertama, dominasi ekonomi Tiongkok dalam BRICS menjadi tantangan utama, mengingat negara tersebut menyumbang sekitar 70% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) BRICS (Yu, 2023). Kondisi ini berisiko menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap tekanan untuk mengikuti agenda geopolitik Tiongkok, yang dalam beberapa kasus dapat bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kedua, Indonesia juga menghadapi tantangan kompetisi ekonomi di dalam BRICS, terutama karena kesamaan struktur ekonomi antar negara anggotanya. Persaingan ini berpotensi semakin ketat, baik di pasar global maupun dalam lingkup internal BRICS, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing Indonesia di sejumlah sektor strategis.

Ketiga, keterlibatan Indonesia dalam BRICS membawa konsekuensi geopolitik yang kompleks. BRICS kerap dipersepsikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai aliansi yang menantang tatanan global yang sudah ada. Persepsi ini berpotensi memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara Barat (World Bank, 2024). Dalam skenario tertentu, Indonesia bahkan dapat terseret dalam konflik politik atau dinamika perang dagang antara anggota BRICS dan kekuatan Barat, yang pada gilirannya bisa merugikan posisi ekonomi maupun diplomatik Indonesia di tingkat internasional.

Dengan demikian, Indonesia perlu menimbang secara cermat keseimbangan antara manfaat dan risiko dalam proses integrasi ke dalam BRICS agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

1.2 Masalah Penelitian

Identifikasi masalah yang pertama adalah menjelaskan tentang potensi ketegangan Indonesia dengan mitra tradisional, keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi menimbulkan ketegangan dengan mitra-mitra tradisionalnya (Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, China, dan India), terutama negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang. Ketegangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk.

Pertama, potensi ketegangan dengan mitra tradisional, keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi menimbulkan ketegangan dengan mitra-mitra tradisionalnya, seperti Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Belanda, serta Uni Eropa. Ketegangan ini dapat muncul dalam dua bentuk utama. Pertama, adanya perubahan persepsi terhadap aliansi geopolitik Indonesia, di mana keterlibatan dalam BRICS dapat dianggap sebagai pergeseran dari prinsip bebas-aktif menuju afiliasi strategis dengan kekuatan seperti Tiongkok dan Rusia yang memiliki agenda reformasi terhadap tatanan global. Kedua, dari aspek ekonomi dan perdagangan, keaktifan Indonesia dalam inisiatif BRICS—misalnya penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan atau pemanfaatan *New Development Bank* (NDB) sebagai alternatif lembaga keuangan global—dapat memicu kekhawatiran mitra dagang tradisional serta berpotensi menimbulkan kebijakan balasan, termasuk pengurangan preferensi perdagangan (Umar, 2024).

Kedua, tantangan di bidang ekonomi, keanggotaan dalam BRICS menghadirkan potensi ketergantungan yang tinggi terhadap investasi dan teknologi dari negara-negara anggota, terutama Tiongkok dan India. Meskipun membuka akses pasar dan transfer teknologi, ketergantungan yang berlebihan dapat melemahkan kemandirian ekonomi nasional serta meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi global. Selain itu, Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan negara anggota BRICS lain, seperti Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan, yang memiliki struktur ekonomi serupa, khususnya dalam ekspor komoditas primer. Situasi ini dapat menurunkan daya saing Indonesia di pasar global maupun di internal BRICS. Di sisi lain, ketidakstabilan geopolitik antara BRICS dan negara-negara Barat juga berpotensi mengganggu hubungan dagang dan investasi Indonesia di luar BRICS (Kemhan, 2025). Untuk mengantisipasi hal ini,

Indonesia perlu memperkuat diversifikasi ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, riset, dan keterampilan tenaga kerja (Permatasari & Muslim, 2024).

Ketiga, tantangan dalam ranah politik dan diplomasi, bergabungnya Indonesia dalam BRICS memiliki implikasi strategis sekaligus dilema diplomatik. Di satu sisi, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota penuh BRICS, sehingga memperluas representasi negara-negara Global South dalam mendorong reformasi tata kelola global (Jash, 2022). Namun, di sisi lain, keanggotaan ini menimbulkan kekhawatiran dari mitra tradisional, terutama negara-negara Barat, yang memandang BRICS sebagai tandingan aliansi Barat. Hal ini berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama keamanan Indonesia dengan mitra strategisnya (Dharmaputra, 2025; Iannone, 2025). Meski demikian, Indonesia tetap memiliki peluang untuk memainkan peran sebagai *bridge-builder*, memperkuat diplomasi multilateral, serta mendorong dialog damai dalam penyelesaian konflik global, dengan tetap konsisten pada prinsip non-blok (Patrick, 2025).

Keempat, tantangan di bidang perdagangan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang besar dalam memperluas pasar, namun juga menghadirkan risiko ketergantungan tinggi pada Tiongkok dan India. Negara-negara ini merupakan produsen besar dalam sektor manufaktur, elektronik, dan barang konsumsi, yang dapat memperketat persaingan dan menekan industri nasional. Selain itu, risiko ketidakseimbangan neraca perdagangan—khususnya akibat impor barang murah dari Tiongkok—dapat memperburuk defisit perdagangan dan mengganggu industri dalam negeri (Douglas, Emont, & Pearson, 2025). Tantangan lain adalah dilema politik luar negeri, di mana keanggotaan BRICS dapat memengaruhi konsistensi Indonesia dalam menjaga prinsip bebas-aktif sekaligus mempertahankan hubungan perdagangan dengan mitra tradisional di luar BRICS (Setiawan, 2025).

Dari keempat identifikasi masalah tersebut, penulis memfokuskan analisis pada masalah kedua (tantangan ekonomi) dan masalah keempat (tantangan perdagangan). Pemilihan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang diversifikasi mitra global di luar kerangka kerja sama tradisional seperti G20, ASEAN, maupun negara-

negara Barat. Kedua, BRICS memiliki instrumen pembangunan, seperti *New Development Bank (NDB)*, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan proyek strategis di Indonesia.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa dampak yang signifikan dan menyentuh berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, diplomasi, dan keamanan. Dari sisi ekonomi, Indonesia mendapat keuntungan berupa perluasan akses pasar, potensi investasi yang lebih besar, serta alternatif pendanaan melalui New Development Bank (NDB) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (Permitindo, 2025). Selain itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS juga membantu mendiversifikasi mitra dagang dan investasi, mengurangi ketergantungan pada pasar konvensional, serta membuka ruang kolaborasi dalam bidang teknologi, energi, dan digitalisasi (Jash, 2022). Dalam ranah politik dan diplomatik, posisi tawar Indonesia di tingkat global meningkat, memastikan negara ini memainkan peran strategis sebagai penghubung antara negara-negara berkembang dan negara maju (Endowment, 2025). Meski demikian, terdapat sejumlah risiko yang harus diantisipasi. Dominasi ekonomi Tiongkok dalam BRICS bisa menciptakan ketergantungan baru bagi Indonesia, sementara potensi persaingan antar anggota, terutama dalam sektor komoditas, bisa menurunkan daya saing nasional (Yu, 2023). Selain itu, membanjirnya produk-produk murah dari Tiongkok dapat mengancam industri domestik, khususnya manufaktur dan UMKM (Indonesiabusinesspost, 2024). Di ranah diplomasi, keterlibatan dalam BRICS dapat menimbulkan persepsi negatif dari negara-negara Barat, yang pada gilirannya bisa berdampak terhadap hubungan ekonomi dan kerja sama keamanan (Dharmaputra, 2025). Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan peran aktifnya di BRICS dengan posisi sentral di ASEAN dan aspirasinya untuk menjadi anggota OECD. Proses tersebut menuntut reformasi regulasi dan tata kelola yang cukup kompleks (Endowment, 2025). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang cermat agar Indonesia mampu memaksimalkan keuntungan dari keanggotaan BRICS tanpa mengorbankan kestabilan nasional maupun peran strategis di kawasan.

Penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang hati-hati dan strategi yang matang dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan ini, guna memastikan bahwa keanggotaan dalam BRICS dapat memberikan manfaat

yang optimal tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis yang terukur untuk memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan risiko dari keanggotaan tersebut. Pertama, penguatan daya saing ekonomi domestik menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan investasi di sektor pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi guna mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri (*Indonesia Ministry of Trade, 2023*). Selain itu, Indonesia harus secara aktif memanfaatkan peluang transfer teknologi dari negara-negara anggota BRICS, seperti Tiongkok dan India, untuk menciptakan nilai tambah pada produk ekspor nasional. Kedua, Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negerinya. Meskipun tergabung dalam BRICS, Indonesia tetap harus mempertahankan kemitraan strategis dengan negara-negara Barat serta mitra dagang utama lainnya guna menghindari ketegangan geopolitik dan memastikan keberlanjutan stabilitas perdagangan (*ASEAN Secretariat, 2024*). Ketiga, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam penguatan diplomasi multilateral, khususnya dengan mendorong reformasi tata kelola ekonomi global yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Hal ini mencakup advokasi terhadap perdagangan bebas yang tidak diskriminatif dan peningkatan representasi negara-negara Selatan Global dalam lembaga-lembaga internasional (*UNDP, 2024*). Terakhir, Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaan dalam BRICS secara selektif dengan menempatkan kerja sama pada bidang-bidang prioritas, seperti pendanaan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, dan peningkatan teknologi manufaktur, sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan jangka panjang (*World Economic Forum, 2024*). Pendekatan strategis ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam BRICS sekaligus menjaga kepentingan nasional dalam dinamika global yang terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. BRICS sebagai kelompok kekuatan alternatif terhadap dominasi Barat kerap dipersepsikan sebagai bentuk aliansi strategis yang dapat bertentangan dengan kepentingan negara-negara blok Barat. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang diplomatik dan geopolitik, namun di dalam itu Indonesia memiliki tantangan bebas aktif. Maka penulis akan menggunakan teori *foreign policy*. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dari penelitian

ini adalah: bagaimana Indonesia menyeimbangkan peran strategisnya, yaitu memanfaatkan diplomasi geopolitik regional sebagai anggota BRICS, sekaligus mengatasi tantangan terhadap konsistensi politik luar negeri bebas-aktif.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dalam upaya membedah rumusan masalah, sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan pokok dari penelitian ini adalah: *Bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang diplomasi geopolitik regional dengan bergabung sebagai anggota BRICS, dan mengatasi tantangan politik luar negeri bebas aktif.*

Selanjutnya, pertanyaan pokok tersebut telah diturunkan ke dalam tiga pertanyaan operasional sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi sehingga Indonesia memutuskan untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS?
2. Apa saja peluang diplomatik geopolitik regional bagi Indonesia dengan bergabung sebagai anggota BRICS, dan bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang tersebut?
3. Apa tantangan politik luar negeri bebas aktif yang dihadapi dengan keanggotaan dalam BRICS, dan Bagaimana Indonesia mengatasinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang penulis ingin capai dari penelitian ini. Di bawah ini merupakan beberapa tujuan yaitu:

- A. Untuk menganalisis strategi diplomatik Indonesia dalam menjaga stabilitas hubungan geopolitik di Kawasan, khususnya di tengah keterlibatannya sebagai anggota BRICS,
- B. Untuk menilai dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama terkait dengan posisinya yang tidak berpihak pada blok kekuatan manapun meskipun terlibat dalam aliansi strategis seperti BRICS, dan
- C. Untuk mengelaborasi teori realisme sebagai teori utama untuk menganalisis diplomatik geopolitik regional Indonesia sebagai

anggota BRICS dengan dua teori pendukung yakni teori kepentingan nasional dan foreign policy untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bagian tugas akhir penulis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hubungan internasional, memperkaya literatur dan melengkapi penelitian sebelumnya serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang studi hubungan internasional, khususnya menganalisis mengenai prinsip bebas aktif dalam keanggotaan Indonesia di BRICS, diharapkan dapat membuat pemahaman tentang kerja sama organisasi internasional dengan negara berkembang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan melalui BRICS, Indonesia dapat memperluas jaringan kemitraan strategisnya di luar aliansi tradisional seperti ASEAN atau kerja sama dengan negara-negara Barat. Hal ini membuka jalan bagi pembentukan koalisi baru dalam negosiasi internasional, yang memperkuat daya tawar Indonesia di forum multilateral. Serta diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para pembaca untuk merancang strategi aliansi yang lebih terorganisir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibuat dengan susunan yang terdiri dari lima bab yang dimana masing-masing bab tersebut telah dibuat untuk dapat menjelaskan titik berat yang berbeda, akan tetapi tetap dalam satu kesatuan yang saling mendukung serta melengkapi dalam penyelesaian penelitian ini. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai struktur yang dimulai dari latar belakang yang menjelaskan

fenomena dan permasalahan pokok yang pada akhirnya akan dijadikan bahan penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang metode terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan landasan teori dan konsep yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta membuat kerangka pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis pengolahan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah, berita, dan artikel internet.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai analisis hasil dan pembahasan dari data penelitian mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian mengenai strategi BRICS dalam menyeimbangkan kekuatan geopolitik Asia-Pasific, khususnya di Indonesia. Sedikitnya ada tiga aspek utama hasil penelitian yang akan disajikan dan dianalisis pada bab IV ini, yaitu: a) Latar Belakang Keanggotaan Indonesia Dalam BRICS; b) Peluang Diplomati Geopolitik Regional, dan c) Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil dari hasil dan pembahasan penelitian yang dijelaskan pada bab 4 dan dijelaskan pula beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk masalah ini serta untuk penelitian selanjutnya.

